



Peran Politik Di Dalam Islam

Shandy Aulia

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Shandyaulia531@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
<p>Vol: 2 No : 3 2025 Halaman : 23-30</p> <p>Keywords: Politics Khulafaur Rashidin period Dynastic period</p>	<p><i>Islam not only governs the relationship between humans and Allah but also encompasses political aspects in societal life. Politics in Islam originated from the role of Prophet Muhammad SAW as a spiritual and political leader who unified the society of Medina through the Constitution of Medina. After the Prophet's passing, the caliphs continued this leadership, establishing a great civilization that influenced both the Islamic world and the West. Over time, the political system in Islam underwent various changes from the era of the Khulafaur Rasyidin to the establishment of major dynasties such as Umayyah, Abbasid, and Ottoman. Each period provided valuable lessons about the dynamics of the relationship between power, religion, and society. The principles of Shura and Islamic law (Sharia) played a foundational role in creating justice, maintaining social stability, and achieving the welfare of the community. The contribution of Islamic politics to world civilization is evident in the development of administrative systems, religious tolerance, and the governance of multicultural states. This abstract highlights the importance of understanding the role of politics in Islamic history and its relevance in the modern context to build a fair and sustainable civilization.</i></p>

Abstrak

Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, tetapi juga mencakup aspek politik dalam kehidupan bermasyarakat. Politik dalam Islam berawal dari peran Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin spiritual dan politik yang menyatukan masyarakat Madinah melalui Piagam Madinah. Setelah wafatnya Nabi, para khalifah melanjutkan kepemimpinan ini, membentuk peradaban besar yang berpengaruh di dunia Islam dan Barat. Seiring waktu, sistem politik Islam mengalami berbagai perubahan dari masa Khulafaur Rasyidin hingga berdirinya dinasti-dinasti besar seperti Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Setiap periode memberikan pelajaran tentang dinamika hubungan antara kekuasaan, agama, dan masyarakat. Prinsip Syura dan hukum Islam (Syariah) berperan sebagai fondasi dalam menciptakan keadilan, menjaga stabilitas sosial, dan mencapai kesejahteraan umat. Kontribusi politik Islam terhadap peradaban dunia terlihat dalam pengembangan sistem administrasi, toleransi beragama, dan pengelolaan negara multikultural. Abstrak ini menyoroti pentingnya memahami peran politik dalam sejarah Islam dan relevansinya dalam konteks modern untuk membangun peradaban yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Politik, Khalifah, Dinasti

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang menyeluruh (*syumuliyah*) tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah (*habluminallah*), tetapi juga hubungan manusia dengan sesama (*habluminannas*) dan lingkungannya. Salah satu aspek penting dalam ajaran Islam adalah *siyasa* (politik), yang merupakan bagian integral dari penerapan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sejarahnya, politik Islam tidak hanya bertujuan mengelola kekuasaan, tetapi juga menciptakan keadilan, menjaga stabilitas sosial, dan mengupayakan kesejahteraan umat.

Kemunculan politik dalam Islam berawal dari peran Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin spiritual dan politik. Piagam Madinah menjadi tonggak awal yang menunjukkan bagaimana Islam menyusun sistem pemerintahan yang inklusif dan berbasis nilai-nilai keadilan. Setelah wafatnya Nabi,

para khalifah penerusnya melanjutkan peran politik ini dalam skala yang lebih luas, membangun peradaban besar yang tidak hanya berpengaruh di dunia Islam, tetapi juga dunia Barat.

Seiring berjalannya waktu, sistem politik Islam mengalami berbagai perubahan, mulai dari masa Khulafaur Rasyidin hingga berdirinya dinasti-dinasti besar seperti Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Setiap periode ini memberikan pelajaran penting mengenai dinamika hubungan antara kekuasaan, agama, dan masyarakat. Oleh karena itu, memahami peran politik dalam sejarah Islam menjadi penting untuk menggali bagaimana Islam memengaruhi sistem pemerintahan dan nilai-nilai politik hingga saat ini.

Kajian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami warisan politik Islam, baik dalam konteks sejarah maupun relevansinya dalam dunia modern. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai nilai-nilai yang melandasi politik dalam Islam dan kontribusinya terhadap pembangunan peradaban manusia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan historis. Data diperoleh melalui studi pustaka, baik dari sumber sekunder seperti Buku, Artikel Jurnal, Dan Publikasi yang relevan Metode ini bertujuan untuk Menganalisis peristiwa masa lalu terkait peran politik dalam Islam, Mengungkap pola, nilai, dan dinamika politik Islam sepanjang sejarah, Dan Menarik relevansi sejarah politik Islam dengan konteks modern. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang hubungan antara agama, politik, dan pemerintahan dalam Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Jazirah Arab sebelum Islam terdiri dari suku-suku (*qabilah*) yang hidup dalam sistem kesukuan. Tidak ada pemerintahan terpusat; kekuasaan dan keputusan berada di tangan pemimpin suku (*sayyid*), yang dipilih berdasarkan kekuatan, kekayaan, atau ketokohan. Dan hubungan antar suku sering kali diwarnai oleh persaingan dan peperangan untuk memperebutkan sumber daya dan kehormatan. (Al Anang & Husein, 2020)

Kesetiaan utama masyarakat diarahkan pada suku masing-masing, sehingga solidaritas suku (*asabiyyah*) menjadi nilai utama (Bahri & Musa, 2022). Lalu tidak ada hukum tertulis; aturan hidup didasarkan pada tradisi (*urf*) dan kebiasaan suku. Dan ketidakadilan sosial, seperti eksploitasi kaum lemah (wanita, anak-anak, dan budak), meluas akibat lemahnya sistem hukum. (Maryani, F., & Juhrocin, 2022)

Kedatangan Nabi Muhammad SAW tidak hanya menjadi rasul, tetapi juga pemimpin politik (Adrian, K. B., & Aeni, A. N. (2023). setelah hijrah ke Madinah. Dan Beliau berhasil menyatukan masyarakat Madinah yang terdiri dari kaum Muslimin, Yahudi, dan suku-suku lainnya.

Lalu Nabi Muhammad SAW. Membuat Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah) (Burhanuddin, 2019) yang merupakan perjanjian tertulis pertama dalam Islam yang berfungsi sebagai konstitusi. Mengatur hubungan antar komunitas dengan prinsip keadilan, kebebasan beragama, dan kerja sama dalam menjaga keamanan bersama. Dan menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin tertinggi yang menjadi rujukan dalam penyelesaian konflik.

Nabi Muhammad SAW berhasil menyatukan Jazirah Arab melalui dakwah, diplomasi, dan peperangan strategis. Penyatuan ini menciptakan stabilitas politik dan sosial di kawasan yang sebelumnya terpecah-pecah oleh konflik suku. Islam menjadi sistem nilai dan pemerintahan yang menyatukan masyarakat berdasarkan iman, bukan ikatan suku.

Peran Politik pada Masa Khulafaur Rasyidin

Periode Khulafaur Rasyidin (11-40 H/632-661 M) merupakan masa transisi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, di mana sistem pemerintahan Islam berada di bawah kepemimpinan empat khalifah pertama: Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Periode ini menjadi tonggak penting dalam sejarah politik Islam karena berbagai keputusan dan kebijakan yang

diambil memberikan fondasi bagi perkembangan politik, pemerintahan, dan hukum Islam di masa mendatang. Selain itu, tantangan yang dihadapi para khalifah menunjukkan bagaimana Islam merespons perubahan sosial, politik, dan budaya.

A. Abu Bakar Ash-Shiddiq (11-13 H/632-634 M)

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam menghadapi krisis kepemimpinan karena tidak ada sistem formal yang ditetapkan untuk memilih pengganti beliau. Musyawarah di Saqifah Bani Sa'adah menjadi momen penting dalam penentuan khalifah pertama, di mana Abu Bakar Ash-Shiddiq dipilih atas dasar pengalaman, kedekatan dengan Nabi, dan kepercayaan umat. (Yani, 2022)

Pemilihan Abu Bakar menunjukkan pentingnya prinsip syura (musyawarah) dalam sistem politik Islam. Wafatnya Nabi memicu gerakan murtad di kalangan beberapa suku Arab yang menolak membayar zakat atau mengakui otoritas khalifah. Munculnya nabi-nabi palsu, seperti Musailamah Al-Kadzab dan Sajah, menambah tantangan stabilitas politik dan agama. Lalu Abu Bakar memimpin Perang Riddah, serangkaian pertempuran untuk mengembalikan persatuan umat Islam. Keberhasilannya membangun stabilitas menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang tegas dan berlandaskan prinsip Islam.

Meskipun masa pemerintahannya singkat, Abu Bakar mulai meletakkan dasar administrasi negara Islam, termasuk sistem pengelolaan zakat dan pembagian harta rampasan perang. Abu Bakar juga memerintahkan pengumpulan Al-Qur'an dalam bentuk tertulis untuk mencegah hilangnya wahyu akibat gugurnya para penghafal Al-Qur'an.

B. Umar bin Khattab (13-23 H/634-644 M)

Umar dikenal sebagai khalifah yang visioner dan organisator. Beliau memperkenalkan reformasi administratif yang berpengaruh besar pada pemerintahan Islam, antara lain:

1. Baitul Mal: Pembentukan lembaga keuangan negara untuk mengelola harta umat.
2. Sistem Pajak: Penerapan *kharaj* (pajak tanah) dan *jizyah* (pajak bagi non-Muslim), yang digunakan untuk membiayai administrasi negara dan kesejahteraan masyarakat.
3. Pencatatan Militer: Penyusunan daftar tentara (diwan) untuk memastikan pembayaran gaji secara teratur.
4. Sistem Kehakiman: Pengangkatan hakim independen untuk menyelesaikan perselisihan hukum.

Pada masa Umar, wilayah Islam berkembang pesat melalui ekspansi ke Persia, Syam, Mesir, dan Irak. Ekspansi ini dilakukan dengan strategi militer yang cermat, diplomasi yang adil, dan toleransi terhadap penduduk lokal. (Habie, 2022)

Umar memastikan hak-hak non-Muslim terlindungi, seperti terlihat dalam perjanjian Damaskus dan Yerusalem. Penduduk diberi kebebasan beragama dan perlindungan keamanan dengan syarat membayar *jizyah*. Umar dikenal karena hidup sederhana meskipun menjadi pemimpin kekhalifahan yang besar. Beliau sering mengadakan inspeksi langsung untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat terpenuhi.

C. Utsman bin Affan (23-35 H/644-656 M)

Dengan wilayah Islam yang semakin luas, muncul perbedaan bacaan Al-Qur'an di berbagai wilayah, yang dapat memicu perselisihan. Utsman memerintahkan penyeragaman Al-Qur'an dalam satu mushaf standar, yang kemudian disebar ke seluruh wilayah kekhalifahan. Keputusan ini menjadi salah satu warisan terbesar Utsman dalam menjaga kesatuan umat Islam. (Syahrir & Syamsuddin, 2021)

Kebijakan Utsman yang mengangkat kerabatnya sebagai pejabat (nepotisme) memicu ketidakpuasan, terutama di Mesir, Kufah, dan Basrah. Ketegangan ini semakin memuncak dengan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, yang akhirnya berujung pada pemberontakan dan pembunuhan

Utsman di kediamannya. Peristiwa ini menjadi awal dari konflik internal yang membelah umat Islam dan menguji persatuan mereka.

D. Ali bin Abi Thalib (35-40 H/656-661 M)

Pemerintahan Ali diwarnai oleh konflik internal yang dikenal sebagai *fitnah pertama* yang berisikan:

1. Perang Jamal: Perang antara Ali dan kelompok yang dipimpin oleh Aisyah, Thalhah, dan Zubair, yang menuntut keadilan atas pembunuhan Utsman.

2. Perang Siffin: Konflik dengan Muawiyah, gubernur Syam, yang juga menuntut keadilan atas kematian Utsman. Arbitrase yang dilakukan untuk menyelesaikan perang ini justru memperuncing perbedaan.

Munculnya kelompok *Khawarij*, yang menolak arbitrase, menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Ali. Konflik politik ini melahirkan perpecahan ideologis di kalangan umat Islam, . (Iqbal & Andika, 2023).

yang menghasilkan tiga golongan utama:

a. Sunni: Pendukung legitimasi kekhalifahan berdasarkan konsensus.

b. Syiah: Pendukung eksklusif Ali dan keturunannya sebagai penerus Nabi Muhammad SAW.

c. Khawarij: Kelompok yang menolak kepemimpinan Ali dan Muawiyah.

Lalu Ali dibunuh oleh seorang anggota Khawarij pada tahun 40 H/661 M. Peristiwa ini mengakhiri masa Khulafaur Rasyidin dan membuka jalan bagi berdirinya Dinasti Umayyah di bawah Muawiyah.

Dinasti dan Sistem Politik dalam Sejarah Islam

A. Bani Umayyah (661-750 M)

Dinasti Umayyah merupakan dinasti pertama dalam sejarah Islam yang memperkenalkan sistem pemerintahan berbasis monarki turun-temurun, menggantikan sistem musyawarah yang digunakan pada era Khulafaur Rasyidin. (Bahri & Musa, 2022)

Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan dinasti ini dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Sistem monarki diperkenalkan, di mana kekuasaan diwariskan kepada keturunan khalifah. Model pemerintahan terpusat dengan struktur administrasi yang lebih rapi, termasuk pembentukan departemen-departemen untuk mengelola keuangan, militer, dan urusan rakyat. Bani Umayyah dikenal karena ekspansi besar-besaran, yang mencakup penaklukan Andalusia (Spanyol), wilayah Asia Tengah, dan Afrika Utara. Serangan ke Perancis yang dipimpin oleh Abdul Rahman Al-Ghafiqi di Perang Tours (732 M) menandai puncak pengaruh Islam di Eropa Barat, meskipun serangan tersebut gagal.

Dan Bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi pemerintahan, menggantikan bahasa Yunani dan Persia. Hal ini menyatukan berbagai wilayah di bawah satu identitas bahasa dan memperkuat kekuasaan pusat. Namun ketidakpuasan atas kebijakan diskriminatif terhadap non-Arab (mawali) dan konflik internal menjadi penyebab utama kemunduran dinasti ini.

B. Bani Abbasiyah (750-1258 M)

Bani Abbasiyah menggantikan Bani Umayyah setelah revolusi besar pada tahun 750 M. Dinasti ini menonjol sebagai masa keemasan Islam, dengan pusat pemerintahan di Baghdad.

Abbasiyah mendukung penerjemahan karya-karya Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab, menciptakan era kemajuan ilmu pengetahuan di bidang sains, filsafat, matematika, dan kedokteran. (Daulay dkk., 2021)

Lembaga seperti *Baitul Hikmah* (House of Wisdom) di Baghdad menjadi pusat penerjemahan dan pengembangan ilmu. Dinasti ini melibatkan banyak pejabat dari kalangan Persia, yang memperkuat pengaruh budaya Persia dalam pemerintahan. Tradisi administrasi Persia seperti sistem birokrasi yang terorganisasi diadopsi untuk memperkuat kekuasaan Abbasiyah.

Dan Pecahnya wilayah kekuasaan Abbasiyah menjadi dinasti-dinasti kecil, seperti Fatimiyah, Umayyah di Andalusia, dan Seljuk, menunjukkan lemahnya kendali pusat pada akhir masa kekuasaan Abbasiyah. Abbasiyah melemah akibat serangan eksternal seperti invasi Mongol pada tahun 1258 M, yang menghancurkan Baghdad dan menandai akhir resmi dinasti ini.

C. Kerajaan Islam di Berbagai Belahan Dunia

1. Dinasti Fatimiyah

Dinasti Fatimiyah berdiri pada abad ke-10 di Afrika Utara, dengan Mesir sebagai pusat kekuasaannya. Dinasti ini mengambil nama dari Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW, dan dikenal sebagai dinasti Syiah Ismailiyah. (Permatasari & Ulya, 2022)

Fatimiyah memainkan peran strategis dalam politik dan kebudayaan dunia Islam. Fatimiyah mendirikan Kairo sebagai ibu kota mereka pada tahun 969 M setelah menguasai Mesir. Kairo berkembang menjadi pusat intelektual, perdagangan, dan spiritual di dunia Islam, menarik ilmuwan, pedagang, dan cendekiawan dari berbagai belahan dunia.

Universitas Al-Azhar, yang didirikan pada masa pemerintahan Fatimiyah, menjadi lembaga pendidikan tertua yang terus beroperasi hingga kini. Awalnya, universitas ini difokuskan pada pengajaran Syiah, tetapi kemudian berkembang menjadi pusat studi Islam Sunni. Al-Azhar berkontribusi besar dalam menyebarkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang teologi, hukum Islam, dan filsafat. Fatimiyah membangun jaringan politik yang luas dengan dinasti-dinasti Islam lainnya, meskipun sering terjadi konflik ideologi antara Sunni dan Syiah. Dalam seni dan budaya, Fatimiyah meninggalkan warisan berupa masjid, istana, dan karya seni dekoratif yang memperkaya peradaban Islam.

2. Dinasti Mughal

Dinasti Mughal berkuasa di anak benua India dari abad ke-16 hingga abad ke-18. Dinasti ini merupakan salah satu dinasti Islam yang paling berpengaruh dalam sejarah, dengan kekuatan militer yang besar dan kontribusi budaya yang sangat khas. Dinasti ini memadukan Islam dengan budaya lokal India, menciptakan harmoni antara tradisi Islam dan Hindu. Hal ini tercermin dalam kebijakan toleransi agama, terutama pada masa pemerintahan Akbar Agung. (Lubis dkk., 2021)

Sistem pemerintahan Mughal yang terorganisasi dengan baik membantu mereka mempertahankan kendali atas wilayah yang luas dan beragam secara etnis dan agama. Karya arsitektur Mughal menjadi simbol kejayaan mereka, seperti Taj Mahal yang dibangun oleh Shah Jahan sebagai perwujudan cinta dan seni. Benteng Agra, Masjid Jama, dan kota Fatehpur Sikri adalah contoh lain dari keindahan arsitektur Mughal yang mencerminkan perpaduan antara seni Islam, Persia, dan India.

Mughal memperkenalkan sistem pajak yang efisien berdasarkan hasil pertanian, yang membantu menciptakan stabilitas ekonomi. Mereka juga mengembangkan perdagangan internasional, menjadikan wilayah mereka sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dan tekstil.

3. Dinasti Safawi

Dinasti Safawi memerintah Persia (sekarang Iran) dari awal abad ke-16 hingga abad ke-18. Mereka memainkan peran penting dalam membangun identitas politik dan keagamaan di wilayah tersebut. Safawi menjadikan Syiah sebagai agama resmi negara, memperkuat perbedaan identitas dengan dinasti-dinasti Sunni lainnya seperti Utsmaniyah dan Mughal. (Azizah & Mawardi, 2023)

Hal ini menciptakan transformasi besar dalam struktur sosial dan keagamaan di Persia, menjadikannya pusat utama Syiah hingga saat ini. Safawi dikenal karena seni lukis miniatur, permadani Persia, dan arsitektur yang megah. Masjid Syah di Isfahan adalah salah satu contoh utama kemegahan arsitektur Safawi. Sastra Persia juga berkembang pesat pada masa ini, dengan pengaruh yang menyebar ke berbagai belahan dunia Islam.

Safawi membangun kekuatan militer yang tangguh untuk menghadapi ancaman dari Utsmaniyah di barat dan Mughal di timur. Meskipun sering terlibat konflik dengan tetangganya, mereka juga menjalin hubungan diplomatik dengan Eropa, memperluas pengaruh mereka ke panggung internasional.

4. Dinasti Utsmaniyah

Dinasti Utsmaniyah adalah dinasti Islam terbesar dan terlama, memerintah dari abad ke-13 hingga awal abad ke-20. Mereka dikenal karena kemampuan militer, administrasi pemerintahan yang efisien, dan kontribusi budaya yang luas. Utsmaniyah mencapai puncak kejayaan mereka di bawah pemerintahan Sultan Suleiman Al-Qanuni (Suleiman yang Agung), dengan wilayah yang membentang dari Eropa Tenggara, Timur Tengah, hingga Afrika Utara. (Putra, 2024)

Penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II pada tahun 1453 menjadi salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah dunia, menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium dan awal era baru bagi dunia Islam. Lalu Utsmaniyah menerapkan hukum berbasis syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal melalui *kanun* (undang-undang sekuler). Sistem militer seperti pasukan Janissari dan struktur administrasi yang rapi membantu mereka mempertahankan kekuasaan selama lebih dari enam abad. Istanbul berkembang menjadi pusat kebudayaan, seni, dan ilmu pengetahuan, dengan banyak bangunan megah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia yang diubah menjadi masjid. Seni kaligrafi, musik, dan sastra berkembang pesat selama era Utsmaniyah, mencerminkan pengaruh Islam dan budaya lokal.

Kontribusi Politik Islam dalam Sejarah Dunia

1. Penerapan Prinsip Syura (Musyawarah)

Prinsip Syura merupakan salah satu prinsip dasar dalam Islam yang mendorong pengambilan keputusan secara musyawarah dan kolektif. Yang mengedepankan partisipasi aktif dari berbagai kalangan dalam pengambilan keputusan, menjadikan pemerintahan lebih inklusif dan memperkuat rasa persatuan dalam masyarakat.

Prinsip Syura telah diterapkan dalam berbagai dinasti Islam dan berkontribusi pada perkembangan sistem pemerintahan yang demokratis. Ini juga menciptakan mekanisme kontrol sosial yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa.

2. Pengaruh Hukum Islam (Syariah)

Hukum Islam didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan, yang mencakup berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat. Dan Menjamin hak-hak dasar setiap warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim, dalam lingkup peradilan dan kebijakan.

Hukum Islam (Syariah) memberikan kerangka yang jelas dalam pembuatan kebijakan politik, melindungi kebebasan beragama, memperjuangkan keadilan sosial, dan menjaga ketertiban sosial. Ini menjadi fondasi dari kebijakan publik dalam banyak kerajaan Islam, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, dan hukum.

3. Kontribusi terhadap Peradaban Dunia

Dinasti-dinasti Islam mengembangkan sistem administrasi yang efisien dan terstruktur, menggunakan birokrasi untuk pengelolaan sumber daya, keuangan, dan kesejahteraan sosial. Sistem diwan (pencatatan administrasi) yang diperkenalkan oleh Bani Umayyah menjadi model yang diadopsi oleh banyak negara di seluruh dunia.

Islam mengajarkan prinsip toleransi, memberikan kebebasan beragama kepada non-Muslim dalam negara-negara Islam, serta menjunjung tinggi hak-hak minoritas. Dan Kerajaan Islam mampu menciptakan harmoni di tengah keberagaman etnis, budaya, dan agama, yang merupakan warisan penting dalam sejarah peradaban dunia.

KESIMPULAN

Islam sebagai agama yang menyeluruh mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Aspek penting dalam ajaran Islam adalah siyasah (politik), yang merupakan bagian integral dari penerapan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Sejarah politik Islam dimulai dengan peran Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin spiritual dan politik, yang menciptakan sistem pemerintahan inklusif melalui Piagam Madinah. Setelah wafatnya Nabi, para khalifah penerus melanjutkan peran politik ini, membangun peradaban besar yang berpengaruh di dunia Islam dan Barat. Seiring waktu, sistem politik Islam mengalami perubahan dari masa Khulafaur Rasyidin hingga berdirinya berbagai dinasti seperti Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Setiap periode memberikan pelajaran tentang dinamika hubungan antara kekuasaan, agama, dan masyarakat. Memahami peran politik dalam sejarah Islam penting untuk menggali bagaimana Islam mempengaruhi sistem pemerintahan dan nilai-nilai politik hingga saat ini. Prinsip Syura dan hukum Islam (Syariah) merupakan fondasi yang kuat dalam menciptakan keadilan, menjaga stabilitas sosial, dan mencapai kesejahteraan umat. Politik dalam Islam juga berkontribusi pada peradaban dunia dengan mengembangkan sistem administrasi dan toleransi beragama dalam negara multikultural. Semua ini menunjukkan bahwa nilai-nilai politik Islam tetap relevan dalam dunia modern, memberikan panduan dalam membangun peradaban yang adil dan berkelanjutan.

REFERENCES

- Al Anang, A., & Husein, A. (2020). Genealogi Aliran-Aliran Politik dalam Islam. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*
- Azizah, R. L., & Mawardi, K. (2023). Perkembangan Ilmu Pengetahuan Masa Dinasti Safawiyah. *Journal on Education*
- Bahri, H. S. S., & Musa, R. (2022). [The Concept of Asabiyah According to Ibn Khaldun] Konsep Asabiyah menurut Ibnu Khaldun. *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari*
- Burhanuddin, M. (2019). Conflict Mapping Piagam Madinah (Analisa Latar Belakang Sosiokultural Piagam Madinah). *Jurnal Al-Ijtima'iyah*
- Daulay, H. P., Dahlan, Z., & Putri, Y. A. (2021). Peradaban dan pemikiran Islam pada masa Bani Abbasiyah. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*
- Halimah, B. (2018). Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam pemikiran Mufassir. *Jurnal Al daulah fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar*
- Habie, R. O. (2022). Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Khattab Dan Pengaruhnya Pada Kesejahteraan Masyarakat. *Journal of Principles Management and Business*
- Huda, M. N. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*
- Iqbal, M., & Andika, A. K. (2023). Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Khalifah Abu Bakar Dengan Khalifah Ali Bin Abi Thalib. *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)*
- Lubis, D. E., Muhajir, A., & Dahlan, Z. (2021). Peradaban dan Pemikiran Islam Pada Masa Dinasti Mughal di India. *Islamic Education*
- Maryani, F., & Juhrodin, U. ANALISIS URF TERHADAP AKTIVITAS PELAKSANAAN MABIT.
- Nurhayati, E., Nuraeni, T., Adrian, K. B., & Aeni, A. N. (2023). Pengembangan Website POLARAS (Politik ala Rasulullah) untuk Mengenalkan Keteladanan Politik Nabi Muhammad SAW di Sekolah Dasar. *AS-SABIQUN*, 5(3), 781-792.
- Permatasari, T., & Ulya, N. (2022). Sejarah Pendidikan Islam Pada Masa Dinasti FATIMIYAH DI MESIR (909–1171 M). *Wahana Karya Ilmiah Pendidika*

- Putra, M. H. A. (2024). Konflik Dinasti Turki Utsmani-Shafawiyah-Mamluk. *FIHROS: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 7(2 Februari)
- Rofam, G. N. K. M. (2018). Penerapan Konsep'Urf Dalam Kitab Sabilal Muhtadin (Kajian Terhadap Pemikiran Muhammad Arsyad Al-Banjari). *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*
- Syahrir, P. S., & Syamsuddin, D. (2021). Konsep Siyasah Al-Maliyah Pada Masa Khalifah Umar Bin Khaththab Dan Khalifah Utsman Bin Affan. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*
- Yani, A. (2022). Khulafah Al-Rasyidun: Menelaah Kepemimpinan Abu Bakar Al-Shiddiq. *CARITA*